FEB UNMUL

INOVASI, 15 (1) 2019, 105-113

http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI



Transformasi struktural dan ketimpangan antar daerah di provinsi kalimantan timur

Fitri Kartiasih

Politeknik Statistika STIS Email: fkartiasih@stis.ac.id

Abstrak

Tingginya ketimpangan pendapatan mengindikasikan tidak meratanya pembangunan terutama dalam bidang ekonomi di Indonesia. Kalimantan Timur adalah contoh provinsi yang mengalami "growth without development": pertumbuhan ekonomi daerah memang terjadi namun pembangunan tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat Kalimantan Timur (Mubyarto, 2005). Hal ini dapat dilihat dari indeks eksploitasi dan angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi struktural di Provinsi Kalimantan Timur, mengklasifikasikan kabupaten/kota menurut tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya, menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan mengetahui hubungan antara pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil T dan Indeks Theil L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih bertumpu pada sektor primer dan belum terjadi transformasi struktur ekonomi. Berdasarkan Indeks Williamson, tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur relatif tinggi. Berdasarkan Indeks Theil T dan Theil L, ketimpangan antar daerah lebih banyak disebabkan oleh ketimpangan dalam kelompok kabupaten (within) dibanding ketimpangan antar kelompok kabupaten penghasil migas-non penghasil migas (between). Hipotesis Kuznets berlaku atau terjadi di Provinsi Kalimantan Timur selama periode penelitian.

Kata Kunci: Ketimpangan; indeks williamson; indeks theil; kuznets; kalimantan timur

Structural transformation and inequality between regions in East Kalimantan Province

Abstract

The high income inequality indicates the uneven development especially in the economic sector in Indonesia. East Kalimantan is an example of a province that experiences "growth without development": regional economic growth does occur but development is not enjoyed by most people of East Kalimantan (Mubyarto, 2005). This can be seen from the index of exploitation and poverty in East Kalimantan. This study aims to analyze structural transformation in East Kalimantan Province, classify districts / cities according to growth rates and per capita income, analyze the level of income inequality between districts / cities and find out the relationship between per capita income and income inequality. This study uses descriptive analysis, Klassen typology, Williamson index, Theil T index and Theil L. index. The results of the study show that the economic structure of East Kalimantan Province still relies on the primary sector and there has been no transformation of economic structure. Based on the Williamson Index, the level of inequality between regions in East Kalimantan Province is relatively high. Based on Theil T and Theil L indices, inequality between regions is caused more by inequality in the district group (within) than inequality between groups of oil and gas producing non-oil and gas producers (between). The Kuznets hypothesis applies or occurs in East Kalimantan Province during the study period.

Keywords: Inequality; williamson index; theil index; kuznets; east kalimantan

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan sejauh ini cukup mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam banyak kasus relatif tidak bisa mengurangi ketimpangan (disparity). Tingginya ketimpangan pendapatan mengindikasikan tidak meratanya pembangunan terutama dalam bidang ekonomi di Indonesia. Selain itu, tingginya ketimpangan pendapatan juga memperlihatkan adanya heterogenitas antar wilayah. Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan meliputi faktor biofisik/karakteristik wilayah (sumberdaya alam), sumberdaya buatan (ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi), sumberdaya manusia, karakteristik struktur ekonomi wilayah dan kebijakan pemerintah daerah (Daryanto dan Hafizrianda; Rustiadi et al., Sjafrizal).

Ketimpangan antardaerah dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Rp 129,26 juta (BPS [2]). Provinsi ini terkenal kaya dengan sumber daya alam (SDA) terutama minyak, gas bumi, batubara, emas, perikanan dan kelautan serta hasil-hasil hutan yang melimpah. Kalimantan Timur adalah contoh provinsi yang mengalami "growth without development": pertumbuhan ekonomi daerah memang terjadi namun pembangunan tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat Kalimantan Timur (Mubyarto). Hal ini dapat dilihat dari indeks eksploitasi dan angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 tercatat sebesar 9,51 persen. Sedangkan indeks eksploitasi ekonomi Kalimantan Timur sebesar 93,10 persen dan merupakan angka yang paling tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Menganalisis transformasi struktural di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2010-2015; 2) Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya; 3) Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan 4) Mengetahui hubungan antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, instistusional, dan ideologis tehadap berbagai keadaan yang ada (Todaro dan Smith).

Teori pola pembangunan Chenery memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perkonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri (Todaro dan Smith).

Ketimpangan pendapatan itu tidak dapat dihindari, tetapi bukan berarti hal tersebut boleh dibiarkan terus-menerus tinggi. Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak buruk terhadap kestabilan ekonomi dan kestabilan politik. Oleh sebab itu perlu diupayakan ketimpangan yang terjadi tidak terlalu menyolok, atau perkembangan ketimpangan sedapat mungkin jangan sampai membesar. Akan tetapi, usaha untuk menciptakan pemerataan atau pengurangan ketimpangan pendapatan dalam suatu proses pembangunan ekonomi sangatlah sulit. Terutama disebabkan karena adaya trade off antara pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi (Daryanto dan Hafizrianda).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku; PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil) tahun dasar 2010 serta data jumlah penduduk kabupaten/kota di

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil T dan Indeks Theil L.

Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya Sjafrizal. Daerah-daerah pengamatan dibagi dalam empat kuadran, yaitu: Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income); daerah berkembang cepat (high growth but low income); daerah maju tapi tertekan (high income but low growth); dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income)

Ketimpangan pendapatan antar daerah dalam penelitian ini digunakan 3 metode pengukuran yaitu Indeks Williamson, Indeks Theil T dan Indeks Theil L. Formula Indeks Williamson ini pada dasarnya sama dengan *coefficient of variation* (CV) biasa dimana standar deviasi dibagi dengan rataan.

$$CV_{W} = \frac{\sqrt{\sum(Y_{i} - Y)^{2} n_{i}/n}}{Y} \tag{1}$$

Keterangan:

Yi = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur

Ni = jumlah penduduk kabupaten/kota i

N = jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur

Sjafrizal [7] menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan antardaerah berada pada ketimpangan taraf rendah, sedang, atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut: ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson < 0.3; ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara 0.3 - 0.50 dan ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson > 0.50.

Indeks Theil memiliki karakteristik utama yaitu kemampuannya untuk membedakan ketimpangan antar daerah (between-region inequality) dan ketimpangan dalam suatu daerah (within-region inequality). Ketidakmerataan antar kelompok (between) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidakmerataan antar wilayah atau kelompok kabupaten/kota, sedangkan ketidakmerataan dalam kelompok (within) adalah ketidakmerataan yang terjadi di dalam satu wilayah atau kelompok kabupaten/kota tertentu. Dalam penelitian ini akan dilihat ketimpangan pendapatan yang dibagi menjadi dua kelompok wilayah analisis, antara lain:

Kelompok kabupaten/kota penghasil migas yang terdiri dari: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Kelompok kabupaten/kota bukan penghasil migas yang terdiri dari: Kabupaten Paser, Kutai Barat dan Berau.

Koefisien Theil diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Tadjoedin):

$$T = \sum_{i} \sum_{j} \left[\frac{Y_{ij}}{Y} \right] \ln \left[\frac{\bar{Y}_{ij}}{\bar{Y}} \right]$$
 (2)

$$L = \sum_{i} \sum_{j} \left[\frac{n_{ij}}{n} \right] \ln \left[\frac{\bar{Y}}{\bar{Y}_{ij}} \right]$$
 (3)

Keterangan:

T = indeks Theil T L = indeks Theil L

 Y_{ij} = PDRB kabupaten i, kelompok j

Y _ = PDRB Provinsi Kalimantan Timur ($\Sigma \Sigma Y_{ij}$) Y = PDRB per kapita kabupaten i, kelompok j PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya dihitung ketimpangan dalam kelompok dan antar kelompok, dengan rumus sebagai berikut:

Total Ketimpangan = Ketimpangan dalam kelompok+ketimpangan antar kelompok

$$T = T_w + T_B$$

$$T = \sum_{i} \left(\frac{Y_{i}}{Y} \right) T_{i} + \sum_{i} \left(\frac{Y_{i}}{Y} \right) \ln \left(\frac{\overline{Y}_{i}}{\overline{Y}} \right) = T_{w} + T_{B}$$
 (4)

$$T_{i} = \sum_{j} \left(\frac{Y_{ij}}{Y_{i}} \right) \ln \left(\frac{\bar{Y}_{ij}}{\bar{Y}_{i}} \right)$$

$$L = L_{w} + L_{B}$$
(5)

$$L = \sum_{i} \left(\frac{n_{i}}{n}\right) L_{i} + \sum_{i} \left(\frac{n_{i}}{n}\right) \ln \left(\frac{\bar{Y}}{\bar{Y}_{i}}\right) = L_{w} + L_{B}$$
 (6)

$$L_i = \sum_j \left(\frac{n_{ij}}{n_i}\right) \ln \left(\frac{\bar{Y}_i}{\bar{Y}_{ij}}\right) \tag{7}$$

TW dan LW adalah ketimpangan dalam kelompok (within-region inequality) TB dan LB adalah ketimpangan antar kelompok (between-region inequality)

Konsep pemikiran Kuznets (Todaro dan Smith [9]) yang dituangkan dalam bentuk kurva U terbalik, yaitu sewaktu pendapatan per kapita naik, ketidakmerataan mulai muncul dan mencapai maksimum pada saat pendapatan berada pada tingkat menengah dan kemudian menurun sewaktu telah dicapai tingkat pendapatan yang sama dengan karakteristik negara industri. Ketidakmerataan pendapatan akan memburuk pada tahap awal disebabkan upah buruh masih relatif rendah. Dengan demikian pertumbuhan tidak banyak memberikan manfaat bagi golongan miskin atau golongan buruh. Namun dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita, maka permintaan terhadap sarana publik (transportasi, komunikasi, pendidikan, dsb) juga meningkat. Kondisi ini akan memunculkan trickledown effect bagi golongan miskin dengan meningkatnya upah buruh melalui sektor lain. Hipotesis Kuznets (Kurva U-Terbalik) dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan indeks ketimpangan (indeks Williamson, indeks Theil T dan indeks Theil L).

Hasil-hasil utama

Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 204,5 ribu km2 atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura. Daerah ini dapat dikatakan berpenduduk jarang apabila dilihat dari tingkat kepadatannya yang hanya 15,94 jiwa/km2.Selain itu tingkat penyebaran penduduknya timpang atau tidak merata.

Kontribusi Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional relatif tinggi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebesar 442,39 triliun rupiah atau 4,89 persen dari Produk Domestik (PDB) Indonesia. Angka ini merupakan angka kontribusi yang terbesar untuk daerah di luar Jawa. Sedangkan secara nasional, Kalimantan Timur masuk sebagai empat besar provinsi penyumbang PDB Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2010, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 107,87 juta rupiah dan pada tahun 2015 mencapai 152,68 juta rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tercatat sebesar 107,87 juta rupiah pada tahun 2010 dan pada tahun 2015 sebesar 133,57 juta rupiah.

Kalimantan Timur sebagai daerah yang mengandalkan sektor primer, mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi mengalami penurunan dalam kurun waktu 2010-2015. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 sebesar 6,30 persen, kemudian pada tahun 2014 turun menjadi 1,70 persen. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi sebesar -1,17 persen pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kontraksi masing-masing sebesar -0,42 persen dan -4,81 persen.

Struktur ekonomi Kalimantan Timur sangat mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Aktivitas penambangan dan pengolahan minyak dan gas mendominasi ekonomi Kalimantan Timur. Sebagai leading sector ekonomi Kalimantan Timur, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2010 sebesar 49,87 persen terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 kontribusinya melonjak menjadi 57,11 persen. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan pada subsektor pertambangan migas maupun tanpa migas (batubara). Akan tetapi kontribusi sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga 2015, dimana kontribusi pada tahun 2015 sebesar 45,16 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan selama periode pengamatan yaitu dari 24,66 persen pada tahun 2010 turun menjadi 20,60 persen pada tahun 2015.

Tabel 1. Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (%)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.52	5.25	5.47	5.65	7.04	7.51
В	Pertambangan dan Penggalian	49.87	56.69	57.11	55.21	50.19	45.16
C	Industri Pengolahan	24.66	19.46	17.60	17.98	19.32	20.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	6.51	5.86	6.34	6.72	7.49	8.31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.36	4.20	4.23	4.29	4.58	5.13
Н	Transportasi dan Pergudangan	2.27	2.15	2.30	2.58	2.99	3.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.61	0.57	0.62	0.66	0.73	0.85
J	Informasi dan Komunikasi	1.01	0.90	0.95	1.00	1.07	1.21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.18	1.07	1.23	1.43	1.50	1.66
L	Real Estate	0.74	0.66	0.69	0.75	0.84	0.95
M,N	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.17	0.18	0.21	0.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.61	1.53	1.64	1.71	1.94	2.32
P	Jasa Pendidikan	0.67	0.75	0.87	1.02	1.18	1.45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.35	0.34	0.37	0.39	0.44	0.55
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.40	0.35	0.36	0.38	0.43	0.54
	TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

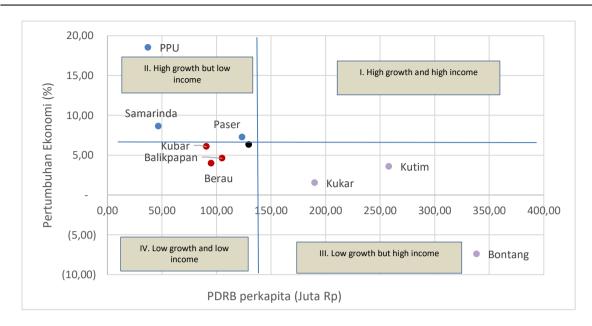
Sumber: BPS, diolah

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor keempat terbesar dalam menyumbang PDRB Kalimantan Timur setelah sektor petambangan dan penggalian; industri pengolahan dan konstruksi. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2015 yaitu dari 5,52 persen pada tahun 2010 naik menjadi 7,51 persen pada tahun 2015. Akan tetapi sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2014 sebanyak 25,53 persen angkatan kerja bekerja pada sektor pertanian, sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hanya sebesar 6,15 persen (BPS [1]).

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semula mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi pertanian menurun. Menurut Chennery [3], sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu daerah akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Hal-hal tersebut di atas belum ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum terjadi transformasi struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2010-2015.

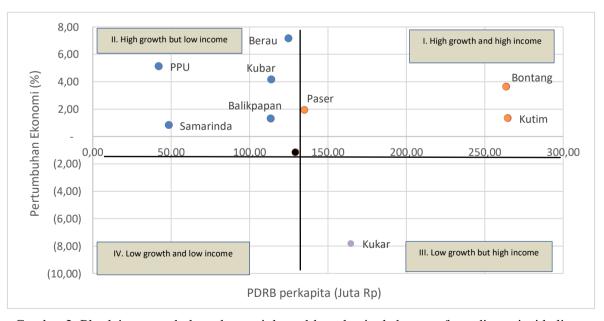
Klasifikasi kabupaten/kota di provinsi kalimantan timur

Tipologi Klassen membagi daerah yang diamati dalam empat klasifikasi, yaitu: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income); (2) daerah berkembang cepat (high growth but low income); (3) daerah maju tapi tertekan (high income but low growth); dan (4) daerah relatif tertinggal (low growth and low income). Analisis dalam penelitian ini menggunakan data PDRB per kapita daerah tahun 2010-2015 untuk mengklasifikasikan kabupaten/kota.



Gambar 1. Plot laju pertumbuhan ekonomi dan pdrb perkapita kabupaten/kota di provinsi kalimantan timur tahun 2011
Sumber: BPS, diolah

Dari Gambar 1 terlihat bahwa kabupaten/kota mengelompok pada tiga kuadran. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser serta Kota Samarinda berada di posisi kuadran dua sebagai daerah berkembang cepat. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) serta Kota Bontang berada di kuadaran tiga yaitu menempati klasifikasi sebagai daerah maju tapi tertekan. Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Berau dan Kota Balikpapan menempati kuadran empat dimana baik pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya di bawah angka provinsi. Tidak ada kabupaten/kota yang menempati kuadran pertama.



Gambar 2. Plot laju pertumbuhan ekonomi dan pdrb perkapita kabupaten/kota di provinsi kalimantan timur tahun 2015 Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2015 terjadi pergeseran posisi dari beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Paser, Kutai Timur dan Kota Bontang menempati kuadran pertama sebagai daerah maju. Kabupaten Kukar tetap berada di kuadran dua. Kuadran tiga ditempati oleh lima kabupaten/kota lainnya. Tidak ada kabupaten/kota yang berada di kuadran empat. Secara umum dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapita dari masing-masing kabupaten/kota sehingga terjadi pergeseran kuadran pada tahun 2015.

Tabel 2. Indeks williamson provinsi kalimantan timur tahun 2010-2015

Tahun	Indeks Williamson
1 anun	mucks williamson
(1)	(2)
2010	0,6977
2011	0,6399
2012	0,6169
2013	0,5730
2014	0,5437
2015	0,5591

Sumber: BPS, diolah

Hasil penghitungan tingkat ketimpangan antardaerah di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan Indeks Williamson dapat dilihat pada Tabel 2. Tingkat ketimpangan antardaerah di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2010-2015 termasuk dalam kriteria ketimpangan yang tinggi yaitu di atas 0,5. Akan tetapi selama kurun waktu penelitian menunjukkan tren menurun dari 0,6977 pada tahun 2010 turun menjadi 0,5591 pada tahun 2015. Adanya sejumlah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi, yang antara lain disebabkan oleh keberadaan migas di daerah tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan antardaerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki kelimpahan sumber daya alam yang berbeda-beda dimana kekayaan alam tersebut menghasilkan pendapatan yang begitu besar bagi daerah yang memilikinya. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kelimpahan sumberdaya alam non migas seperti batubara, emas, perak, kehutanan maupun sektor pertanian yang menghasilkan nilai tambah bruto (PDRB) dalam perekonomian daerah. Kabupaten Kutai Timur, Paser dan Berau serta Kota Bontang merupakan kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi walaupun tanpa memasukkan sektor migas. Dengan adanya perusahaan-perusahaan besar batubara seperti PT Kalimantan Timur Prima Coal (PT. KPC) di Kabupaten Kutim, PT. Berau Coal di Kabupaten Berau maupun PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kalimantan Timur) di Kota Bontang yang merupakan perusahaan produsen pupuk urea dan amoniak terbesar di Indonesia, memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Migas diduga memicu ketimpangan antardaerah menjadi lebih tinggi.

Tabel 3. Dekomposisi indeks theil t provinsi kalimantan timur tahun 2010-2015

		Between		Within	
Tahun	Indeks	Indeks	Kontribusi	Indeks	Kontribusi
	Theil T		(%)		(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	0,2152	0,0060	2,85	0,2028	97,15
2011	0,1874	0,0043	2,34	0,1804	97,66
2012	0,1809	0,0021	1,20	0,1750	98,80
2013	0,1657	0,0010	0,59	0,1643	99,41
2014	0,1499	0,0006	0,39	0,1489	99,61
2015	0,1547	0,0001	0,05	0,1427	99,95

Sumber: BPS, diolah

Tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur jika dilihat menggunakan indeks Theil T dan Theil L menunjukkan ketimpangan yang rendah. Selama periode tahun 2010-2015 indeks Theil T mengalami penurunan dari 0,2152 pada tahun 2010 menjadi 0,1547 pada tahun 2015. Indeks Theil T dan Theil L dapat didekomposisi untuk melihat ketimpangan antar kelompok wilayah (*between*) dan ketimpangan dalam kelompok wilayah (*within*) yang diamati. Wilayah Kalimantan Timur dibagi

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kabupaten/kota penghasil migas dan kelompok kabupaten/kota bukan penghasil migas.

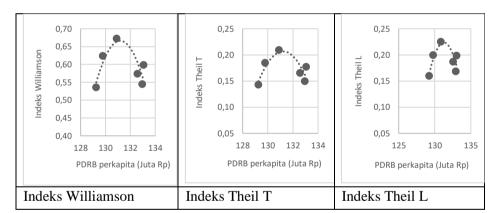
Tabel 4. Dekomposisi indeks theil 1 provinsi kalimantan timur tahun 2010-2015

	_	Between		Within		
Tahun	Indeks Theil L	Indeks	Kontribusi (%)	Indeks	Kontribusi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2010	0,2250	0,0064	2,83	0,2186	97,17	
2011	0,1996	0,0046	2,29	0,1950	97,71	
2012	0,1982	0,0022	1,11	0,1960	98,89	
2013	0,1865	0,0010	0,53	0,1855	99,47	
2014	0,1683	0,0006	0,35	0,1677	99,65	
2015	0,1594	0,0001	0,04	0,1593	99,96	

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 dapat dilihat bahwa ketimpangan dalam kelompok lebih besar kontribusinya dibandingkan ketimpangan antar kelompok. Kontribusi ketimpangan dalam kelompok sebesar 99,95 persen terhadap ketimpangan total di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terutama disebabkan ketimpangan dalam kelompok kabupaten/kota penghasil migas. Sedangkan sisanya 0,05 persen disebabkan oleh ketimpangan antar kelompok.

Untuk melihat apakah hubungan antara pendapatan per kapita dengan tingkat ketimpangan antardaerah di Provinsi Kalimantan Timur baik dengan menggunakan Indeks Williamson maupun Indeks Theil sesuai dengan Hipotesis Kurva U-Terbalik Kuznets, maka dilakukan plot terhadap data-data tersebut. Sumbu vertikalnya (sumbu Y) adalah indeks ketimpangan (Indeks Williamson, Indeks Theil T dan Indeks Theil L) dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontalnya (sumbu X).



Gambar 3. Kurva Hubungan Antara Indeks Williamson, Indeks Theil T dan Indeks Theil L dengan PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 Sumber: BPS, diolah

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa kurva hubungan antara Indeks Williamson dan Indeks Theil dengan PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010-2015 seperti huruf U yang terbalik, artinya hipotesis Kuznets terjadi di provinsi ini selama periode penelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya PDRB per kapita akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Belum terjadi transformasi (pergeseran) struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2010-2015. Struktur ekonomi provinsi ini masih bertumpu pada sektor primer terutama pertambangan dan penggalian.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kabupaten/kota mengelompok di kuadran dua (klasifikasi daerah berkembang cepat).

Ketimpangan antardaerah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur relatif tinggi jika diukur menggunakan indeks Williamson, akan tetapi termasuk ketimpangan rendah jika diukur menguunakan indeks Theil T dan Theil L. Ketimpangan antar kelompok daerah (*between*) penghasil migas dan bukan penghasil migas lebih rendah bila dibandingkan dengan ketimpangan dalam kelompok (*within*).

Hipotesis Kuznets berlaku atau terjadi di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2010-2015.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2015. Kalimantan Timur Dalam Angka 2015. BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2016. Kalimantan Timur Dalam Angka 2016. BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- Chenery, H., Ahluwalia, Bell, Duloy, dan Jolly. 1974. Redistribution with Growth. Oxford University Press, Oxford.
- Daryanto, Arief & Yundy Hafizrianda. 2010. Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi. PT Penerbit IPB Press, Bogor
- Mubyarto. 2005. Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional. PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim, dan DR. Panuju. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Obor Indoneisa, Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduose Media, Padang.
- Tadjoeddin, M.Z., W.I. Suharyo dan S. Mishra. 2003. Regional Disparity and Centre-Regional Conflicts in Indonesia. Working Paper (01/01-E). UNSFIR, Jakarta.
- Todaro, M. P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi Jilid 1. Haris dan Puji [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.